

LAPORAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
MALANG - JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBPP Ketindan bertujuan untuk mewujudkan tata organisasi yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam rangka terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini dibuat sebagai gambaran komitmen bersama dan aksi nyata kami dalam mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan sekaligus umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas BBPP Ketindan kedepannya. Kami menyadari bahwa upaya yang telah kami lakukan masih belum sempurna, namun sesuai dengan motto kami "*think smarter, work faster, serve better*" kami yakin, kami mampu mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada BBPP Ketindan.

Ketindan, 30 Desember 2022
Kepala Balai,



Ir. Sumardi Noor, M.Si.
NIP 196401221994031001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tim Kerja Pembangunan Zona Integrasi Menuju WBK/WBBM	3
II. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BBPP KETINDAN TAHUN 2022.....	5
III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM BBPP KETINDAN TRIWULAN III	10
IV. PENUTUP	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Pemerintah juga telah memantapkan diri untuk berupaya menjadi good government sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan merupakan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik berupa pelayanan pelayanan, telah menerapkan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.

Seiring dengan tuntutan Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tersebut maka pelayanan prima dan integritas kepada publik menjadi prioritas kebijakan strategis. Instansi pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang bersih dan sehat melalui reformasi birokrasi. Untuk itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tim Kerja ini bertugas untuk menyusun rencana dan agenda kerja, melakukan internalisasi dan implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, melakukan penilaian

mandiri pembangunan zona integritas baik secara manual maupun secara elektronik, mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara elektronik, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, maka untuk melihat sejauh mana pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring dan evaluasi.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diubah dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistle-Blower's*)

System) di Lingkungan Kementerian Pertanian;

- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- h. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4582/Kpts/OT.160/8/2013 tentang Pembentukan Unit Penggerak Integritas dan Unit Pembangun Integritas Lingkup Kementerian Pertanian;
- i. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah.
- k. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian.

1.3 Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM BBPP Ketindan

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota. Adapun tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM BBPP Ketindan adalah:

- 1) Menyusun rencana dan agenda kerja;
- 2) Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 3) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 4) Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;

- 5) Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
- 6) Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri;
- 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BBPP Ketindan.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, BBPP Ketindan membangun 6 (enam) komponen pengungkit, yakni:

1. Komponen Manajemen Perubahan;
2. Komponen Penataan Tata Laksana;
3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
4. Komponen Penguatan Akuntabilitas;
5. Komponen Penguatan Pengawasan;
6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM BBPP KETINDAN TAHUN 2022

Untuk membangun Zona Integritas dibutuhkan Tim Kerja yang akan bertugas untuk melaksanakan proses perubahan melalui program, kegiatan dan inovasi di 6 area perubahan. Tim Kerja akan menjadi motor dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tugas Tim Kerja adalah:

1. Menyusun rencana dan agenda kerja;
2. Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Melaksanakan pembangunan zona integritas sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan;
5. Melakukan penilaian mandiri pembangunan zona integritas;
6. Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan zona integritas;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri; dan
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan.

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BBPP Ketindan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK/WBBM BBPP Ketindan Tahun 2022

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
1.	Manajemen Perubahan	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim kerja pembangunan Zona Integritas di BBPP Ketindan	Membentuk tim pembagunan Zona Integritas	Januari
		Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya rencana kerja pembangunan ZonaIntegritas di BBPP Ketindan	1. Membuat dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas	Januari
				2. Matrik Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Januari
				3. Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Januari
		Pemantauan (monitoring) dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BBPP Ketindan	1. Memantau dan mengevaluasi pembangunan Zona Integritas	Triwulan
				2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi	Triwulan
				3. Melaporkan hasil tindaklanjut pemantauan dan evaluasi	Triwulan
				4. Review Fungsi ZI	Juli
				5. Implementasi Review Fungsi ZI	Agustus
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat BBPP Ketindan	1. Pimpinan sebagai role model	Januari s.d Desember
				2. Menetapkan agen perubahan	Januari
				3. Menetapkan disiplin kerja	Januari
				4. Penggunaan Pin WBK	Januari
				5. Implementasi pemutaran atau pengumuman kepada ASN tentang peningkatan pegawai melalui media informasi	Januari
2.	Penataan Tatalaksana	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di BBPP Ketindan	1. SOP Pemberian Reward dan Hukuman	Juni
		Sistem Perkantoran melalui IT (<i>e-office</i>)	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam	2. SOP SISO	Januari
				1. Sistem Informasi Manajemen ASN (SIM ASN)	Migguan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
			proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat BBPP Ketindan	2. Aplikasi SISO	Januari s.d Desember
				3. Layanan TI PPID	Januari s.d Desember
		Keterbukaan informasi publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari BBPP Ketindan	1. Membentuk TIM PPID	Januari
				2. Aktif mempublikasikan kegiatan Balai melalui media sosial BBPP Ketindan (Facebook, Twitter, Instagram, Website) dan pemberitahuan online maupun offline	Januari s.d Desember
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada BBPP Ketindan	1. Mengusulkan kebutuhan pegawai ke BPPSDMP Kementan	Januari
		Pola mutasi internal	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur BBPP Ketindan	1. Monitoring dan evaluasi mutasi internal	Semester
				2. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal	Semester
		Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur BBPP ketindan	1. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat dan beasiswa	Januari
		Penetapan kinerja individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur BBPP Ketindan	1. Masing-masing pegawai membuat SKP Online yang bersisi target kerja dan perjanjian kinerja	Januari
				2. Monitoring dan evaluasi capaian SKP secara berkala	Triwulan
		Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai	Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada BBPP Ketindan	1. Membuat absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari)	Januari s.d Desember
				2. Membuat surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar	Januari s.d Desember
				3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari	Januari s.d Desember
		Sistem informasi kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur BBPP Ketindan	Memutakhirkan data pada SIMPEG	Mingguan

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
4.	Akuntabilitas Kinerja	Keterlibatan pimpinan	Meningkatnya kinerja pada BBPP Ketindan	1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Januari
				2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja	Januari
				3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala	Triwulan
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur BBPP Ketindan	1. Mengawal dan membimbing tata kerja pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan	Triwulan
				2. Pemantauan langsung dalam pengelolaan keuangan di Aplikasi OMSPAN dan E-MONEV Keuangan	Triwulan
				3. Laporan kinerja tepat waktu	Triwulan
5.	Penguatan Pengawasan	Pengendalian gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur BBPP Ketindan	1. <i>Public Campaign</i> melalui banner, poster media sosial	Januari
				2. Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari
		Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan Negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara	1. Internalisasi SPIP	Juni
				2. Audit internal	Juli
				3. Laporan SPI secara berkala	Triwulan
		Pengaduan masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di BBPP Ketindan	1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat di BBPP Ketindan	Januari s.d Desember
				2. Menindaklanjuti penanganan pengaduan masyarakat	Januari s.d Desember
				3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Januari s.d Desember
				4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan atas pengaduan masyarakat	Januari s.d Desember
		Whistle blowing system	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di BBPP	1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	Semester
				2. Rekapitulasi laporan WBS	Desember

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	WAKTU
1	2	3	4	5	6
			Ketindan		
		Penangan benturan kepentingan	Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BBPP Ketindan	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 2. Monitoring dan evaluasi secara berkala	Semester Desember
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di BBPP Ketindan	1. Membuat kebijakan standar pelayanan di BBPP Ketindan 2. Mempublikasikan standar pelayanan di BBPP Ketindan 3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di BBPP Ketindan 3. Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di BBPP Ketindan	Juni Juli Juli Desember
		Budaya pelayanan prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat dan lebih mudah dijangkau di BBPP Ketindan	Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika dan <i>capacity building</i> di BBPP Ketindan	Juni
		Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di BBPP Ketindan	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BBPP Ketindan 2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka 3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BBPP Ketindan	Triwulan Semester Semester

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM BBPP KETINDAN TRIWULAN IV

A. Manajemen Perubahan

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan untuk mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Indikator dilakukannya manajemen perubahan ini adalah terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja BBPP Ketindan, menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan, terimplementasinya *Core Value* ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif). Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 2.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Penyusunan Tim Kerja	Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas	Telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas
2.	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas	Telah dibentuk rencana kerja pembangunan Zona Integritas
3.	Pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan Zona Integritas	Terlaksana kegiatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas	Telah dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas secara Triwulan
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya Komitmen, pola pikir dan budaya kerja	Telah dijadikan pimpinan sebagai role model bagi Aparatur Sipil Negara, menetapkan agen perubahan, penggunaan seragam dan

			atribut lengkap.
--	--	--	------------------

B. Penataan Tatalaksana

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Tata Laksana. Penataan tata laksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Indikator dilakukannya penataan tata laksana ini adalah tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan utama, *e-office*, dan keterbukaan informasi publik.

Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 3.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan utama	Terwujudnya Peta Proses Bisnis BBPP Ketindan	Telah diterapkan SOP Kegiatan Utama dan SOP Kegiatan Penunjang.
2.	Sistem Perkantoran menggunakan It (e-office)	Meningkatnya Penggunaan TI dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja	Telah digunakan Aplikasi di berbagai bagian untuk mendukung kinerja masing masing bagian.
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi	Telah dibentuk tim Pengelola Informasi Publik dan aktif mempublikasi kegiatan maupun dokumen melalui website dan media sosial BBPP Ketindan

C. Penataan Manajemen Sistem Sumber Daya Manusia (SDM)

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Berikut matrik realisasi rencana kerja

pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 4.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Telah mengusulkan Kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta peta jabatan.
2.	Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Pada tahun 2022 tidak terdapat pegawai yang dimutasi internal/ rotasi antar jabatan.
3.	Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM	Telah dilakukan pengembangan kompetensi pegawai melalui Bimbingan Teknis, Workshop, Pelatihan, Webinar.
4.	Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel	Penetapan Kinerja Individu dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Matrik Peran Hasil (MPH) serta dilakukan monitoring secara berkala oleh atasan langsung.
5.	Penegakan aturan disiplin/ kode etik	Meningkatnya disiplin SDM	Telah dilakukan sosialisasi kode etik, Sanksi pemotongan tulin apabila terdapat ASN yang terlambat masuk jam kerja.
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya Transparansi dan keakuratan data Pegawai	Telah dilakukan oleh petugas kepegawaian untuk memutakhir data pegawai.

D. Penguatan Akuntabilitas

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja BBPP Ketindan.

Untuk menguatkan akuntabilitas, maka Kepala BBPP ketindan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan seperti penyusunan RKA-KL, RKT dan Rencana Strategis. Kepala BBPP Ketindan juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja. Selanjutnya Kepala BBPP Ketindan pun memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 5.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada BBPP Ketindan	Telah dilakukan penyusunan perencanaan, penetapan kinerja, pemantauan secara berkala oleh Kepala BBPP Ketindan
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja BBPP Ketindan	Telah dilakukan perencanaan berdasarkan Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

E. Penguatan Pengawasan

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di BBPP Ketindan.

Indikator untuk pengukuran pencapaiannya: pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan.

Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 6.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Pengendalian Gratifikasi	Public campaign Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan Public Campaign Pengendalian gratifikasi melalui Website, Media Sosial dan telah dibentuk Tim UPG
2.	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan	Telah dilakukan Pengendalian Intern pada BBPP Ketindan
3.	Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih an terhindar dai penyalahgunaan wewenang	Telah diimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai media yang telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
4.	Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara	TIDAK TERLAKSANA
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	telah diidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan telah dilakukan evaluasi

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Komponen keenam dalam Pembangunan Zona Integritas adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Standar pelayanan publik pada BBPP Ketindan meliputi ruang lingkup pelayanan:

- a. Pelatihan
- b. Sertifikasi profesi
- c. Edukasi pertanian
- d. Pendayagunaan ketenagaan pelatihan
- e. Konsultasi agribisnis

- f. Penelitian dan permagangan
- g. Informasi dan dokumentasi
- h. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

Standar pelayanan publik tersebut wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 6.

Berikut matrik realisasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan pada table 6.

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Standar Pelayanan	Terwujudnya Unit Pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional	Telah ditetapkan kebijakan standar pelayanan dan telah dipublikasikan serta penerapan SOP terkait pelayanan.
2.	Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public lebih cepat dan mudah	Telah dilakukan sosialisasi kode etik dan capacity building untuk seluruh pegawai BBPP Ketindan
3.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat dan dipublikasikan di website resmi BBPP Ketindan namun belum ditindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk mentransformasi system dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan culture set (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2022 telah terealisasi **100%**.

B. Penataan Tata Laksana

Dalam membangun Zona Integrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Tatalaksana Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur. Rencana Kerja pada area Penataan Tatalaksana Tahun 2022 telah terealisasi **100%**.

C. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penataan Sistem Manajemen SDM Tahun 2022 telah terealisasi **100%**.

D. Penguatan Akuntabilitas

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja di BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Akuntabilitas Tahun 2022 telah terealisasi **100%**.

E. Penguatan Pengawasan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kepala BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Kepala BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Penguatan Pengawasan Tahun 2022 telah terealisasi **80%** dikarenakan wilayah **“Whistle Blowing System” Tidak dilaksanakan karena merupakan wilayah tugas pusat.**

F. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BBPP Ketindan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program dan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada BBPP Ketindan. Rencana Kerja pada area Manajemen Perubahan Tahun 2022 telah terealisasi **100%**.